



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENSTRA BKAD

TAHUN 2016-2021
(PERUBAHAN)



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju *good governance*.

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016- 2021. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Kuala Tungkal, November 2017

KEPALA BPKAD
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. RAJIUN SITOANG, ME

Pembina Tk. I

NIP. 19611120 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 2.1.	Struktur Organisasi BPKAD Kab. Tanjung Jabung Barat	10
Tabel 2.1.	PNS pada BPKAD berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2.	PNS pada BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	14
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	17
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	31
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	33
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Renstra Perangkat Daerah-nya dan telah dilakukan penetapan. Dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar tercipta sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan guna pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 nomor 23);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 68);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan dan asset selama 5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengoperasionalkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sehingga tujuan dan sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai;
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerjanya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Secara Tipologi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong ke dalam Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yakni :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang anggaran meliputi: pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dibidang anggaran;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang anggaran;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
3. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan meliputi: pelayanan keuangan Daerah, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pelayanan Keuangan Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pelayanan Keuangan Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perbendaharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pelayanan Keuangan Daerah;
2. Sub Bidang Belanja Langsung;
3. Sub Bidang Belanja Tidak langsung;

4. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang aset meliputi : perencanaan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan aset. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang Aset;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang Aset;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penatausahaan Aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Aset, serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan Aset;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan penatausahaan Aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Aset serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan Aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
3. Sub Bidang Pemindahtanganan, Penilaian dan Penghapusan;

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang aset meliputi : akuntansi dan pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan, dan dokumentasi dan informasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: :

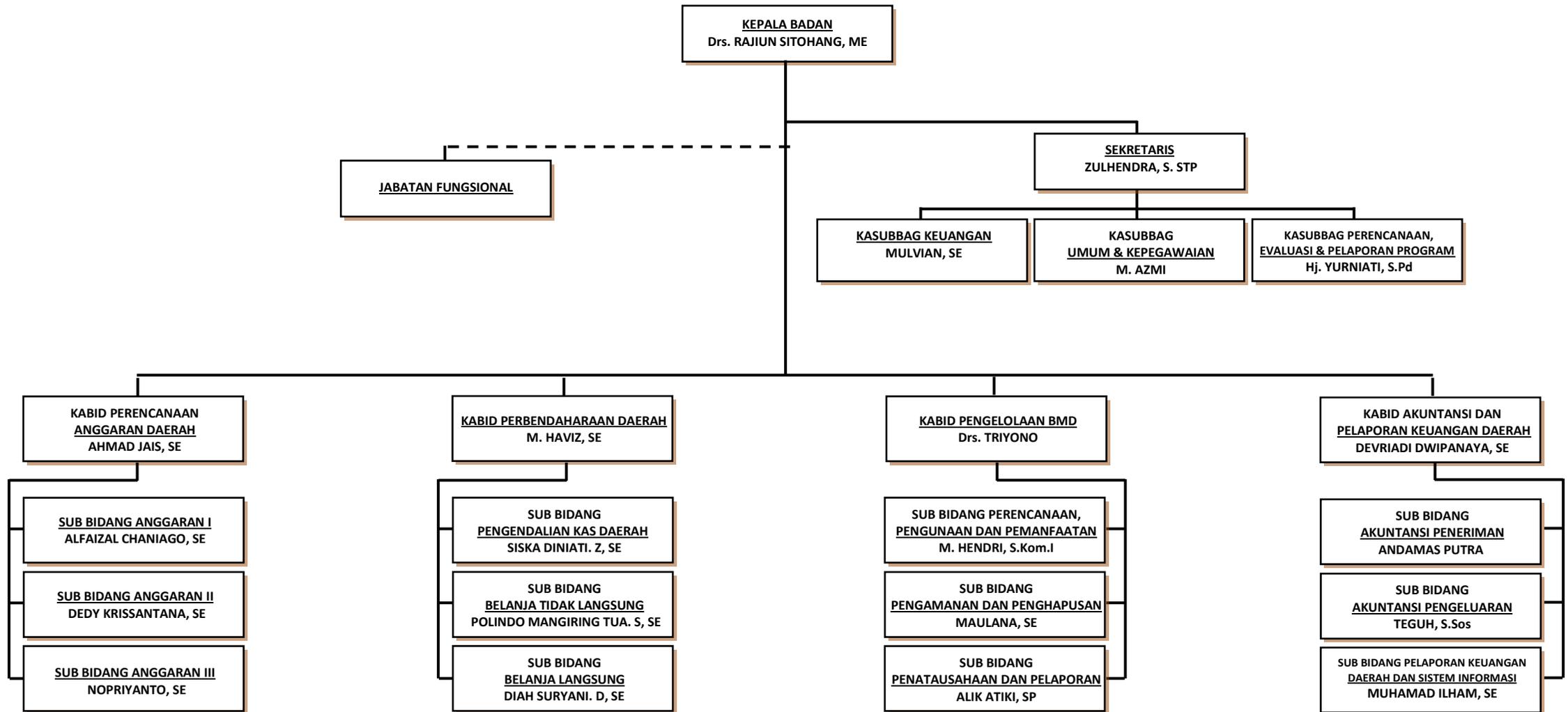
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penatausahaan keuangan Daerah, dan dokumentasi dan informasi keuangan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penatausahaan keuangan Daerah, dan dokumentasi dan informasi keuangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Akuntansi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. Subbidang Penatausahaan Keuangan;
3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Keuangan.

Selanjutnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertera pada **Bagan 2.1.** berikut :

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini akan dijelaskan sumber daya yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 40 (empat puluh) orang yang semuanya PNS dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi. Sistem Kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat, cermat dan akurat, karena perangkat daerah ini memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah. Untuk mencapai tujuan organisasi maka seluruh komponen organisasi diarahkan untuk berperan serta secara aktif dalam membangun sistem yang solid, implementasinya adalah selalu bekerjasama dalam tim sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak mewakili kepentingan orang per orang tapi yang muncul adalah kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah tim yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku. Manajemen kerja yang efisien, efektif waktu dan responsif sampai saat ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal yang masih harus dilengkapi dan diperbaiki dari segi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perlunya disiapkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengerti dan piawai dalam memahami liku-liku birokrasi, hal ini berlaku bagi mereka yang menduduki eselonering dari eselon 4 sampai dengan eselon 2. Hal ini sangat penting sekali mengingat sebagai instansi yang vital, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang cepat. Bila pemimpin-pemimpin dibekali dengan teknik perumusan strategi yang baik dalam hal pengambilan keputusan di lingkup birokrasi, tentunya hal ini menjadi nilai plus bagi organisasi karena setiap kali dibutuhkan di saat kapanpun, mampu menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang berkualitas dan mempunyai jangkauan yang luas serta tidak memiliki resiko hukum karena kebijakan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur dengan baik.

Berikut ini data PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklasifikasikan berdasarkan golongan sebagaimana **Tabel 2.1.** dan tingkat pendidikan sebagaimana **Tabel 2.2.** berikut :

Tabel 2.1.
PNS pada BPKAD berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	8	6	14
3	III	16	7	23
4	IV	3	0	3
Jumlah		27	13	40

Tabel 2.2.
PNS pada BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	7	6	13
4	D-3	2	2	4
5	D-4	1	0	1
6	S-1	14	7	21
7	S-2	1	0	1
Jumlah		25	15	40

Selain PNS, tugas-tugas keseharian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dibantu oleh beberapa orang tenaga Non PNS yang bertugas dan ditempatkan pada tiap-tiap unit kerja. Tingginya beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan bantuan tenaga Non PNS dalam rangka mengatasi kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung sistem kerja agar tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas.

2. Sarana dan Prasarana

Dikarenakan keterbatasan gedung kantor yang representatif, pada awal pembentukan dan beroperasinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, organisasi ini menempati Lantai 2 gedung Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 67/Kep.BUP/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Keputusan terlampir).

Selain itu guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat difasilitasi pula dengan Inventarisasi Kantor sebagaimana (lampiran 1) terlampir.

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru terbentuk pada Bulan Januari 2017, maka tingkat capaian kinerja organisasi ini untuk periode sebelum Renstra Perangkat Daerah ini diperoleh dari gambaran tingkat capaian kinerja pada organisasi yang fungsi-fungsinya masuk ke dalam pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekarang. Adapun organisasi dimaksud yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah pada Sekretariat Daerah. Lebih lanjut Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100
	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kegiatan	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	5 Dokumen/SKPD	-	-	-	-	5 Dokumen/SKPD	-	-	-	-	5 Dokumen/SKPD	-	-	-	-	100
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD sesuai ketentuan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100
	Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	100	-	-
	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	-	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	-	100	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	100	100	100	100
	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	100	100	100	100
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100	-	-
	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Kas melalui Laporan Arus Kas yang Transparan dan Akuntabel	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100	100	100
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100
	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				1 2011	2 2012	3 2013	4 2014	5 2015	1 2011	2 2012	3 2013	4 2014	5 2015	1 2011	2 2012	3 2013	4 2014	5 2015	
	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	100	100	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	100	100	100	-	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100	
	Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah	Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	100	
	Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbangunnya pembangunan jaringan SIPKD	1 Jaringan	-	1 Jaringan	-	-	-	-	1 Jaringan	-	-	-	-	100	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlatihnya SDM Keuangan Unit Kerja	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	100	100	
	Penatausahaan Penerimaan	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100	-	-	-	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD terlaksana sesuai ketentuan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100	
	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang akurat	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	100	-	100	100	
	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Inventarisasi Milik Daerah Semesteran	Tersusunnya Laporan Mutasi Barang Inventarisasi Milik Daerah Semesteran	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	100	100	100	100	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100	100	100	100	
	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	100	100	100	100	
	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	100	100	100	-	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	100	100	100	100	
	Bimtek Pengelolaan BMD	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan BMD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	100	100	100	-	
	Pengadaan/Pembelian Tanah	Terlaksananya Pengadaan/Pembelian Tanah sesuai ketentuan	Jumlah Persil Tanah	-	12 Persil	-	-	-	-	12 Persil	-	-	-	-	100	-	-	-	

Kuala Tungkal, November 2017

Kepala BPKAD
Kab. Tanjung Jabung Barat



Drs. RAJIUN SITOHANG, ME
Pembina Tk. I
NIP. 19611120 199203 1 001

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** berikut :

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Asset Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	-	461.086.217	706.687.100	696.828.100	672.207.000	-	423.675.100	639.448.900	654.273.400	620.083.250	0,00	91,89	90,49	93,89	92,25	8,32	8,40
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	-	341.386.000	588.593.598	775.803.100	587.235.550	-	325.356.200	334.387.798	759.616.800	552.656.700	0,00	95,30	56,81	97,91	94,11	10,72	11,53
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	-	305.606.500	374.607.300	469.848.800	359.612.500	-	294.343.400	333.884.050	366.971.000	310.441.900	0,00	96,31	89,13	78,10	86,33	3,58	1,23
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	247.358.500	334.822.308	314.886.700	336.061.000	-	238.150.500	328.451.308	297.026.200	85.411.000	0,00	96,28	98,10	94,33	25,42	7,19	(16,09)
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	-	-	-	132.035.500	-	-	-	-	79.569.500	-	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	-	-
Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	-	-	-	-	141.225.000	-	-	-	-	138.777.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	100,00	100,00
Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	-	-	145.043.100	84.158.000	134.462.500	-	-	91.626.600	60.998.000	134.355.200	0,00	0,00	63,17	72,48	99,92	36,97	46,82
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-	57.633.100	-	-	-	-	53.788.700	-	-	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	-	-
Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	-	429.686.880	459.416.180	452.048.800	456.527.300	-	417.685.880	387.779.350	380.353.650	408.206.000	0,00	97,21	84,41	84,14	89,42	1,49	(0,59)
Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	-	892.671.000	1.067.871.000	1.063.537.500	1.155.237.100	-	871.431.000	962.441.000	942.624.500	1.001.519.600	0,00	97,62	90,13	88,63	86,69	6,28	3,44
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	-	380.998.300	444.280.300	431.097.700	404.406.600	-	375.537.400	385.819.860	371.076.100	323.770.250	0,00	98,57	86,84	86,08	80,06	1,41	(3,55)
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	193.730.500	-	-	-	-	182.580.500	-	-	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	-	-
Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	-	-	326.235.000	282.556.500	274.436.500	-	-	278.424.450	-	247.816.000	0,00	0,00	85,34	0,00	90,30	31,07	47,09
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	-	629.815.640	1.020.972.000	1.053.903.500	-	-	609.890.640	977.403.650	967.733.400	0,00	0,00	96,84	95,73	91,82	38,97	37,88
Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	-	110.386.000	118.890.000	205.689.000	166.976.000	-	109.346.000	103.348.000	168.329.200	155.719.500	0,00	99,06	86,93	81,84	93,26	9,40	8,64
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	-	-	-	225.460.000	157.822.500	-	-	-	176.841.400	156.214.400	0,00	0,00	0,00	78,44	98,98	41,18	46,90
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	279.603.150	271.003.150	425.121.000	-	-	272.223.150	227.300.900	424.194.766	-	0,00	97,36	83,87	99,78	0,00	(28,66)	(29,47)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	362.069.500	453.049.500	380.533.000	328.199.600	-	351.111.100	415.466.500	355.097.000	272.493.700	0,00	96,97	91,70	93,32	83,03	(2,22)	(5,64)
Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah	-	-	-	-	143.568.500	-	-	-	-	136.568.500	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	100,00	100,00
Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	577.390.000	-	-	-	-	-	568.897.500	-	-	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	93.128.000	101.489.000	-	-	-	61.618.000	-	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	52,15	-
Penatausahaan Penerimaan	-	120.718.600	-	-	-	-	-	112.998.600	-	-	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	455.000.000	465.800.000	240.100.000	-	-	449.320.540	456.816.352	239.143.420	0,00	0,00	98,75	98,07	99,60	20,68	20,88
Penyusunan Standar Satuan Harga	-	106.792.840	175.522.600	164.387.300	132.576.600	-	97.737.840	155.078.925	139.813.200	132.560.500	0,00	91,52	88,35	85,05	99,99	4,45	6,63
Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	-	-	580.405.425	112.000.300	100.910.000	-	-	530.958.000	90.600.300	99.175.000	0,00	0,00	91,48	80,89	98,28	12,72	13,76
Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	209.662.000	-	350.985.500	241.052.500	-	194.149.500	-	194.171.800	212.638.100	0,00	92,60	0,00	55,32	88,21	3,92	3,08

Penyusunan Laporan Mutasi Barang Inventarisasi Milik Daerah Semesteran	-	171.643.135	210.372.930	141.940.700	77.415.000	-	164.149.300	161.395.430	108.830.700	77.029.000	0,00	95,63	76,72	76,67	99,50	(15,67)	(17,04)
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	118.316.135	143.638.310	189.024.500	96.606.500	-	109.111.550	104.999.850	157.054.900	94.254.100	0,00	92,22	73,10	83,09	97,56	(3,96)	(3,19)
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	135.781.300	187.460.207	207.426.400	173.696.000	-	127.570.600	162.838.208	168.181.200	173.492.000	0,00	93,95	86,87	81,08	99,88	5,38	7,27
Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	382.244.050	445.297.790	881.749.500	-	-	370.617.502	377.593.300	635.890.470	-	0,00	96,96	84,80	72,12	0,00	(22,36)	(26,78)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	117.521.860	178.980.051	177.554.500	150.460.000	-	100.910.300	120.044.750	130.814.500	144.108.700	0,00	85,87	67,07	73,68	95,78	5,27	8,71
Bimtek Pengelolaan BMD	-	88.306.850	84.548.200	95.845.000	-	-	85.286.850	74.330.200	80.723.000	-	0,00	96,58	87,91	84,22	0,00	(32,86)	(35,49)
Pengadaan/Pembelian Tanah	-	5.089.659.400	29.950.000	-	-	-	4.640.025.750	29.950.000	-	-	0,00	91,17	100,00	0,00	0,00	(99,41)	(99,36)
Jumlah	-	10.928.888.217	8.662.853.289	9.840.417.400	7.686.186.750	-	10.250.315.022	7.501.147.759	8.238.889.588	6.684.167.220	0,00	93,79	86,59	83,73	86,96	(8,74)	(10,91)

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penganggaran

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA- SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA- SKPD, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Penatausahaan dan Pelaporan

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berperan mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aset daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa langkah dalam pengelolaan aset pemerintah daerah meliputi : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan sampai dengan penghapusan kedepan akan dilakukan menggunakan aplikasi yang direncanakan akan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aspek legal yang jelas menjadi

sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang terdapat pada Laporan BMD harus mencerminkan atau sama dengan yang dicantumkan dalam neraca daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2010-2015 sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.3. tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks
- b. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing
- c. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa
- d. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah masih belum dapat dilakukan lebih intens.

- e. Lokasi aset daerah yang sulit dijangkau dan diidentifikasi.
- f. Belum optimalnya pengakuan terhadap *reward and punishment*
- g. Belum maksimalnya dukungan jaringan online

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu :

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki
2. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
4. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan
7. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
8. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan aset terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai.
2. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset masih kurang memadai.
3. Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dan belum diterapkannya Analisis Standar Biaya (ASB) dalam penyusunan anggaran.
4. Belum adanya hasil evaluasi indikator kinerja sebagai input perencanaan penganggaran tahun berikutnya.
5. Dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.
6. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV.
7. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD masih rendah.
8. Verifikator SKPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Belum adanya Data Barang Milik Daerah yang akurat sebagai dasar penyusunan Aset Tetap pada Neraca.
10. Terkait dengan Bentuk pemanfaatan aset yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasi asset idle yang terdapat di SKPD.
11. Penatausahaan BMD masih dilakukan secara manual, belum menggunakan aplikasi.
12. Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan mengacu daftar inventaris barang serta standar sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran.
13. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
14. Masih rendahnya komitmen SKPD dalam menindaklanjuti temuan-temuan LHP BPK RI.
15. Belum optimalnya pengakuan terhadap reward and punishment.

1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yakni : **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keempat Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun rencana strategisnya yakni Misi Keempat **“Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah : **“Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada Program Pembangunan Nasional tercantum Visi Kementerian Keuangan yaitu : **“Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”**, berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan

keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Sedangkan pada Program Pembangunan Provinsi Jambi tercantum visi **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”**

Bertitik tolak dari Visi Pembangunan Provinsi Jambi diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar ummat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi yang tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**

Dari visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan setiap tahunnya dalam bentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh setiap SKPD berdasarkan anggaran kinerja.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 menetapkan Visi yaitu **”Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan

dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. **Kekuatan/potensi** (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. **Kelemahan** (*Weaknes*)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.

- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1.** sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
 SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Sebelum tanggal 30 November Tahun n-1	Tepat Waktu	Perda APBD	Kepala Badan					
			2. Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang dibayarkan}}{\text{Jumlah SP2D yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SP2D, Dok. Transaksi Bank, Keluhan Penerima SP2D	Kepala Badan
			3. Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah LK SKPD sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	85%	85%	85%	85%	90%	100%	LK Perangkat Daerah	Kepala Badan
			4. Persentase Laporan BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah LBMD SKPD sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	85%	85%	85%	85%	90%	100%	LBMD Perangkat Daerah	Kepala Badan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1.** berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas			
MISI : Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (e-budgeting)	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset secara tranparan dan akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016–2021 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam **Tabel 6.1.** di bawah ini :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)	-	12 Bulan	239.648.550	12 Bulan	1.398.977.334	12 Bulan	2.412.790.653	12 Bulan	2.212.559.651	12 Bulan	2.526.622.064	12 Bulan	2.652.953.167	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat berjalan lancar	-	-	-	12 Bulan	2.295.000	12 Bulan	2.295.000	12 Bulan	2.295.000	12 Bulan	2.409.750	12 Bulan	2.530.238	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	-	-	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	630.000.000	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan	-	-	-	-	-	35 Orang	109.620.000	35 Orang	61.320.000	35 Orang	115.101.000	35 Orang	120.856.050	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan hasil tindak lanjut	-	-	-	1 Dokumen	268.520.000	1 Dokumen	391.960.000	1 Dokumen	610.377.500	1 Dokumen	441.535.500	1 Dokumen	463.612.275	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan, penerangan bangunan kantor	-	-	-	12 Bulan	4.979.634	12 Bulan	3.413.190	12 Bulan	3.413.190	12 Bulan	3.583.850	12 Bulan	3.763.042	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	-	-	-	239.648.550	12 Bulan	214.559.550	12 Bulan	185.490.100	12 Bulan	196.745.358	12 Bulan	208.753.537	12 Bulan	219.191.213	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
			01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	12 Bulan	12.010.000	12 Bulan	14.220.000	12 Bulan	14.220.000	12 Bulan	14.931.000	12 Bulan	15.677.550	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya penerangan bangunan kantor	-	-	-	12 Bulan	5.463.150	12 Bulan	3.477.363	12 Bulan	4.952.503	12 Bulan	5.200.128	12 Bulan	5.460.135	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	-	-	-	12 Bulan	49.500.000	12 Bulan	19.200.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	22.050.000	12 Bulan	23.152.500	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	-	-	-	12 Bulan	39.200.000	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	75.600.000	12 Bulan	79.380.000	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	-	-	-	12 Bulan	202.450.000	12 Bulan	1.017.115.000	12 Bulan	1.226.236.100	12 Bulan	1.037.457.300	12 Bulan	1.089.330.165	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat		
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah	-	60%	406.000.000	62%	377.350.000	64%	248.400.000	66%	334.425.000	68%	301.657.000	70%	316.739.850	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
			02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	406.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat
			02 09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	12 Bulan	224.100.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	28.400.000	12 Bulan	21.160.000	12 Bulan	22.218.000	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
			02 12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	153.000.000	12 Bulan	95.550.000	12 Bulan	100.327.500	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat			
			02 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat
			02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpelihara dan teramankannya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	12 Bulan	116.050.000	12 Bulan	159.400.000	12 Bulan	122.025.000	12 Bulan	152.397.000	12 Bulan	160.016.850	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
			02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpelihara dan teramankannya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	32.550.000	12 Bulan	34.177.500	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat	-	-	-	80%	62.175.000	85%	45.325.000	90%	55.600.000	95%	55.314.000	100%	58.079.700	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat	
03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	-	-	-	80 Stel	62.175.000	80 Stel	45.325.000	80 Stel	55.600.000	80 Stel	55.314.000	80 Stel	58.079.700	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat				
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN	-	-	-	72%	20.000.000	75%	50.000.000	78%	30.000.000	80%	52.500.000	82%	55.125.000	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat				
05 05	Pengembangan SDM	Terlaksananya Bimtek bagi aparat	-	-	-	5 Orang	20.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	52.500.000	5 Orang	55.125.000	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat				
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"	-	-	-	95%	69.000.000	100%	58.000.000	100%	22.000.000	100%	64.050.000	100%	67.252.500	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat				
06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen Pelaporan (LPPK, LKJIP, LK SKPD)	-	-	-	3 Dokumen	69.000.000	3 Dokumen	58.000.000	3 Dokumen	22.000.000	3 Dokumen	64.050.000	3 Dokumen	67.252.500	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	-	Tepat Waktu	8.016.737.900	Tepat Waktu	10.130.405.050	Tepat Waktu	8.113.894.100	Tepat Waktu	5.229.746.151	Tepat Waktu	8.433.527.021	Tepat Waktu	8.710.791.931	BKAD (Bidang Perencanaan Anggaran Daerah)	Kab. Tanjung Jabung Barat	
				Ketersediaan kas/dana tepat waktu	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BKAD (Bidang Perencanaan Anggaran Daerah)	Kab. Tanjung Jabung Barat	
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	-	85%		85%		85%		85%		90%		100%		BKAD (Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah)	Kab. Tanjung Jabung Barat	
				Persentase laporan BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	-	85%		85%		85%		85%		90%		100%		BKAD (Bidang Pengelolaan BMD)	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Raperda/Perda tentang APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	547.650.000	2 Dokumen	1.724.550.000	2 Dokumen	1.528.109.250	2 Dokumen	1.555.588.500	2 Dokumen	1.558.824.246	2 Dokumen	1.574.412.488	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Raperbup/Perbup tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	549.425.000	2 Dokumen	415.275.000	2 Dokumen	310.690.000	2 Dokumen	295.106.000	2 Dokumen	342.535.725	2 Dokumen	359.662.511	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Raperda/Perda tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	677.640.000	2 Dokumen	293.400.000	2 Dokumen	224.225.000	2 Dokumen	172.433.750	2 Dokumen	247.208.063	2 Dokumen	259.568.466	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup/Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	8 Dokumen	346.550.000	8 Dokumen	250.235.400	8 Dokumen	209.292.500	8 Dokumen	160.397.375	8 Dokumen	230.744.981	8 Dokumen	242.282.230	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	20 Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan DAU dan DAK	12 Bulan	-	-	12 Bulan	134.300.000	12 Bulan	113.512.500	12 Bulan	104.500.000	12 Bulan	125.147.531	12 Bulan	131.404.908	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	21 Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah	-	-	-	12 bulan	147.876.000	12 Bulan	114.977.000	12 Bulan	134.487.500	12 Bulan	126.762.143	12 Bulan	133.100.250	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	22 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	46.842.550	2 Kegiatan	33.341.120	2 Kegiatan	26.858.176	2 Kegiatan	36.758.585	2 Kegiatan	38.596.514	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	23 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	46 Entitas	98.185.000	46 Entitas	260.320.000	46 Entitas	157.235.000	46 Entitas	287.002.800	46 Entitas	301.352.940	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	24 Penatausahaan Penerimaan	Laporan penerimaan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	88.250.000	12 Laporan	76.500.000	12 Laporan	30.070.000	12 Laporan	84.341.250	12 Laporan	88.558.313	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	25 Penatausahaan Belanja	Laporan belanja	12 Laporan	-	-	12 Laporan	87.500.000	12 Laporan	75.450.000	12 Laporan	33.570.000	12 Laporan	83.183.625	12 Laporan	87.342.806	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	26 Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terwujudnya penatausahaan BMD berbasis sistem informasi	12 Bulan	12 Bulan	149.075.000	12 Bulan	295.370.000	12 Bulan	383.495.000	12 Bulan	120.050.000	12 Bulan	227.855.250	12 Bulan	239.248.013	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	27 Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase penghapusan BMD sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	189.250.000	12 Bulan	194.450.000	12 Bulan	196.535.000	30%	156.834.150	12 Bulan	220.489.500	12 Bulan	231.513.975	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat	
		17	28 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan fisik dan sertifikasi tanah milik pemkab	-	12 Bulan	279.125.000	12 Bulan	1.035.606.000	12 Bulan	516.400.000	12 Bulan	443.750.000	12 Bulan	398.475.000	12 Bulan	418.398.750	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Penanggung-jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		17	29	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase penetapan status BMD	-	-	-	100%	106.350.000	100%	64.650.000	100%	27.750.000	100%	124.760.050	100%	130.998.053	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	30	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	2 Dokumen	2 Dokumen	85.700.000	2 Dokumen	119.300.000	2 Dokumen	65.230.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	113.821.250	2 Dokumen	119.512.313	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	31	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Badan	Dokumen Perencanaan (Renja)	-	-	-	-	34.500.000	1 Dokumen	77.800.000	1 Dokumen	23.900.000	1 Dokumen	82.215.000	1 Dokumen	86.325.750	Sekretariat	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	32	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD	10 Dokumen/ SKPD	10 Dokumen/ SKPD	117.366.000	10 Dokumen/ SKPD	107.310.000	10 Dokumen/ SKPD	93.152.500	10 Dokumen/ SKPD	36.791.500	10 Dokumen/ SKPD	102.700.631	10 Dokumen/ SKPD	107.835.663	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	33	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjung Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	Tersusunnya alokasi belanja per triwulan pada DPA SKPD	46 SKPD	46 SKPD	-	46 SKPD	97.675.000	46 SKPD	93.707.500	46 SKPD	34.664.250	46 SKPD	103.312.519	46 SKPD	108.478.145	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	34	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya LBMD	2 Dokumen	2 Dokumen	98.500.000	2 Dokumen	70.800.000	2 Dokumen	127.000.000	2 Dokumen	58.650.000	2 Dokumen	121.741.875	2 Dokumen	127.828.969	Bidang Pengelolaan BMD	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	35	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	46 SKPD	46 SKPD	-	46 SKPD	94.119.600	46 SKPD	85.125.000	46 SKPD	20.525.500	46 SKPD	93.850.313	46 SKPD	98.542.828	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	36	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Tersusunnya Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	46 SKPD	46 SKPD	-	46 SKPD	121.880.000	46 SKPD	86.081.000	46 SKPD	35.802.500	46 SKPD	94.904.303	46 SKPD	99.649.518	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	37	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Tertaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	12 Bulan	12 Bulan	317.630.300	12 Bulan	184.719.750	12 Bulan	134.979.750	12 Bulan	69.300.000	12 Bulan	148.815.174	12 Bulan	156.255.933	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	38	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Tertaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	115.120.000	12 Bulan	274.261.750	12 Bulan	265.230.980	12 Bulan	170.750.000	12 Bulan	292.417.155	12 Bulan	307.038.013	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	39	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan dan aset daerah	12 Bulan	-	1.439.200.000	12 Bulan	2.148.700.000	12 Bulan	2.031.100.000	12 Bulan	648.200.000	12 Bulan	2.051.461.778	12 Bulan	2.071.976.395	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	40	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Tertaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Langsung kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	338.370.000	12 Bulan	173.550.000	12 Bulan	143.250.000	12 Bulan	83.054.450	12 Bulan	157.933.125	12 Bulan	165.829.781	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	41	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terevaluasinya Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	12 Bulan	-	-	12 Bulan	142.700.000	12 Bulan	131.250.000	12 Bulan	76.250.000	12 Bulan	144.703.125	12 Bulan	151.938.281	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	42	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terkendalinya Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan	217.919.000	12 Bulan	150.675.000	12 Bulan	120.375.000	12 Bulan	71.087.500	12 Bulan	132.713.438	12 Bulan	139.349.109	Bidang Perbendaharaan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	43	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tertaksananya kelancaran pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah	12 bulan	12 bulan	761.000.000	12 bulan	292.605.000	12 bulan	154.500.000	12 bulan	132.835.000	12 bulan	170.336.250	12 bulan	178.853.063	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	44	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	130.550.000	12 Dokumen	121.700.000	12 Dokumen	85.920.000	12 Dokumen	37.455.000	12 Dokumen	94.726.800	12 Dokumen	99.463.140	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	45	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	266.525.000	4 Dokumen	217.400.000	4 Dokumen	223.615.000	4 Dokumen	124.675.000	4 Dokumen	246.535.538	4 Dokumen	258.862.314	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat
		17	80	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	155.175.000	4 Dokumen	187.250.000	4 Dokumen	196.612.500	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyusunan dan Revisi Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	-	-	-	1 Dokumen	79.805.000	1 Dokumen	40.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	1 Dokumen	105.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	4 Laporan	4 Laporan	139.125.000	4 Laporan	119.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah	Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	108.800.000	12 Bulan	111.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Penatausahaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Daerah	Dokumen Keuangan Daerah Terarsipkan secara Elektronik	-	-	-	12 Bulan	55.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Pelaksana Pelaporan Akuntansi Pendapatan dan Belanja	Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah	12 Laporan	12 Laporan	152.050.000	12 Laporan	132.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD terlaksana sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	113.500.000	1 Dokumen	41.900.000	1 Dokumen	47.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang akurat	1 Laporan	1 Laporan	501.667.600	1 Laporan	213.964.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah								8.662.386.450		12.057.907.384		10.928.409.753		7.884.330.802		11.433.670.085		11.860.942.148			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 dapat dilihat pada **Tabel 7.1.** berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah	-	60%	62%	64%	66%	68%	70%
3	Meningkatnya disiplin aparatur	-	-	80%	85%	90%	95%	100%
4	Meningkatnya kompetensi ASN	-	-	72%	75%	78%	80%	82%
5	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP “B”	-	-	95%	100%	100%	100%	100%
6	Penetapan APBD Tetap Waktu (APBD ditetapkan paling lambat 30 November)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Peningkatan persentase belanja langsung terhadap Belanja Tdak Langsung	52,17%	44,09%	52%	52%	52%	52%	52%
8	Pemenuhan alokasi belanja sesuai amanat undang-undang							
	- Alokasi belanja kesehatan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	- Alokasi belanja pendidikan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
9	Penerbitan DPA tepat waktu (Paling lambat minggu kedua bulan Januari)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
10	Penerbitan SPD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Penerbitan SK Pengelola Keuangan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
12	Penerbitan SP2D tepat waktu (1 (satu) hari sejak penerbitan SPM)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
13	Meningkatnya tingkat kepuasan OPD atas pelayanan perbendaharaan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
14	Seluruh OPD dapat menyusun dan menyajikan laporan Triwulan/Semester dan Tahunan tepat Waktu	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD
15	Penyajian Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu (Minggu kedua pada bulan Pebruari setelah tahun anggaran)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
16	Seluruh OPD memiliki Laporan Barang Milik Daerah	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD	45 SKPD
17	Terbitnya Laporan Barang Milik Daerah yg didukung dengan Laporan Barang Milik Daerah dari OPD tepat waktu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan
18	Peningkatan persentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	22%	25%	27%	30%	32%	35%	37%
19	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
20	Terlaksananya pemindahtangan barang milik daerah	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada unit kerja masing-masing.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus dapat meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal, vertikal maupun horizontal dengan berbagai pihak dengan pertimbangan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LKj SKPD. Selain itu Renstra yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga **"Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"** dapat tercapai.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

BARANG INVENTARISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Kode Barang	Nama/Barang Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03.01.02.03.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	Toyota New Avanza Veloz	-	Besi/Piber	2013	-	MHKM1CA4JDK035037	DDK7180	BH 1257 EZ	-	APBD	163.900.000	
2	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Blade	-	-	2011	-	-	-	BH 6325 EZ	-	APBD	13.425.000	
3	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Blade	-	-	2011	-	-	-	BH 6324 EZ	-	APBD	13.425.000	
4	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Blade	-	-	2011	-	-	-	BH 6327 EZ	-	APBD	13.425.000	
5	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda/ Vario Techno125	125 CC	Besi / Metal	2014	-	-	-	BH 6973 EZ	-	APBD	16.300.000	
6	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda/ Vario Techno125	125 CC	Besi / Metal	2014	-	-	-	BH 6975 EZ	-	APBD	16.300.000	
7	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda/ Vario Techno125	125 CC	Besi / Metal	2014	-	-	-	BH 6981 EZ	-	APBD	16.300.000	
8	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda/ Vario Techno125	-	-	2012	-	-	-	BH 6417 EZ	-	APBD	13.862.200	
9	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda/ Vario Techno125	-	-	2012	-	-	-	BH 6540 EZ	-	APBD	13.862.200	
10	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Supra 125 X Helm In Fi	-	-	2012	-	-	-	BH 6467 EZ	-	APBD	14.479.000	
11	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Supra Helm In 12	-	-	2013	-	-	-	BH 6639 EZ	-	APBD	15.675.000	
12	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	Honda Supra Helm In 12	-	-	2013	-	-	-	BH 6633 EZ	-	APBD	15.675.000	
13	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	HONDA	MEGA PRO	-	2009	-	MHIKC12139K219350	KC12E 1218773	BH 6143 EZ	-	APBD	19.820.000	
14	03.01.05.01.	Sepeda Motor	0001	HONDA	MEGA PRO	-	2009	-	MH1KC12179K219450	KC12E 1218485	BH 6145 EZ	-	APBD	19.820.000	
15	06.02.01.27.	Kursi Rapat	0001	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	APBD	299.900	
16	06.02.01.27.	Kursi Rapat	0002	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	APBD	299.900	
17	06.02.01.27.	Kursi Rapat	0003	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	APBD	299.900	
18	06.02.01.27.	Kursi Rapat	0004	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	APBD	299.900	
19	06.02.01.27.	Kursi Rapat	0005	-	-	Campuran	2007	-	-	-	-	-	APBD	299.900	
20	06.04.03.08.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001	Savello	-	-	2012	-	-	-	-	-	APBD	7.832.000	
21	06.01.04.04.	Filling Besi/Metal	0001	CKMayu/Hitam	-	-	2013	-	-	-	-	-	APBD	2.475.000	
22	06.04.07.06.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0001	-	m,L.40cm,	Besi, Kaca	2015	-	-	-	-	-	APBD	9.848.300	
23	06.04.07.06.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0002	-	m, L.40cm,	Besi, Kaca	2015	-	-	-	-	-	APBD	10.113.400	

NO	Kode Barang	Nama/Barang Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	06.01.04.02.	Rak Besi/Metal	0001	-	-	Besi / Metal	2014	-	-	-	-	-	APBD	24.250.000	
25	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0001	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
26	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0002	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
27	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0003	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
28	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0004	HP/ 20-2210X AIO IPnCtel	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
29	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0005	HP/ 20-2210X AIO IPnCtel	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
30	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0006	HP/ 20-2210X AIO IPnCtel	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
31	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0007	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
32	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0008	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
33	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0009	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
34	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0010	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
35	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0011	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
36	06.03.02.01.	PC Unit (Personal Computer)	0012	HP/ 20-2210X AIO PC	Core I3lcd 19	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
37	06.03.02.02.	Lap Top	0001	HP/ 242-GI	Core i7 325	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
38	06.03.02.02.	Lap Top	0002	HP/ 242-GI	Core i7 326	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.975.000	
39	06.03.02.02.	Lap Top	0003	Lenovo		Campuran	2016						APBD	12.930.000	
40	06.03.02.06.	Tablet PC	0001	APPLE/ Ipad air	Core 1,3 G	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	15.300.000	
41	06.03.02.06.	Tablet PC	0002	APPLE/ Ipad air	Core 1,3 G	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	15.300.000	
42	06.03.02.06.	Tablet PC	0003	APPLE/ Ipad air	Core 1,3 G	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	15.300.000	
43	06.03.02.06.	Tablet PC	0004	APPLE/ Ipad air	Core 1,3 G	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	15.300.000	
44	06.03.05.02	Monitor	0001	LG			2013						APBD	2.400.000	
45	06.03.05.02	Monitor	0002	LG			2013						APBD	2.400.000	
46	06.03.04.10	Scanner	0001	HP 64010			2013						APBD	3.900.000	
47	06.03.04.10	Scanner	0002	HP 64010			2013						APBD	3.900.000	
48	06.03.05.03.	Printer	0001	EPSON LQ-2190	Printer Dot Matrix	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	11.900.000	
49	06.03.05.03.	Printer	0002	EPSON LQ-2190	Printer Dot Matrix	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	11.900.000	

NO	Kode Barang	Nama/Barang Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	06.03.05.03.	Printer	0003	EPSON LQ-2190	Printer Dot Matrix	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	11.900.000	
51	06.03.05.03.	Printer	0001	BROTHER	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	7.900.000	
52	06.03.05.03.	Printer	0001	HP Laser Jet	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.600.000	
53	06.03.05.03.	Printer	0002	HP Laser Jet	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.600.000	
54	06.03.05.03.	Printer	0003	HP Laser Jet	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.600.000	
55	06.03.05.03.	Printer	0004	HP Laser Jet	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.600.000	
56	06.03.05.03.	Printer	0001	CANON IP 2770	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.500.000	
57	06.03.05.03.	Printer	0002	CANON IP 2770	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.500.000	
58	06.03.05.03.	Printer	0003	CANON IP 2770	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.500.000	
59	06.03.05.03.	Printer	0001	HP Laser Jet		Campuran	2016						APBD	2.520.000	
60	06.03.05.03.	Printer	0002	HP Laser Jet		Campuran	2016						APBD	2.520.000	
61	06.03.05.03.	Printer	0003	HP Deks Jet		Campuran	2016						APBD	1.640.000	
62	06.01.04.06.	Brankas	0001	Chubsafes	-	-	2011	-	-	-	-	-	APBD	59.400.000	
63	06.02.06.99.	Alat Rumah Tangga Lainnya	0001	HP/ Storage work RDX	-	-	2013	-	-	-	-	-	APBD	9.450.000	
64	06.02.06.99.	Alat Rumah Tangga Lainnya	0001	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	174.000.000	
65	04.03.01.71.	Global Postioning System	0001	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	APBD	9.500.000	
66	06.03.01.01.	Mainframe	0001	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	83.800.000	
67	06.03.06.02.	Router	0001	None/ RB1100AHX2	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.450.000	
68	06.03.05.13.	Hardisk Eksternal	0001	Savello	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.620.500	
69	06.03.03.12	Hardisk	0001	Sony			2013						APBD	960.000	
70	06.03.03.12	Hardisk	0002	Sony			2013						APBD	960.000	
71	06.03.06.03.	Hub	0001	None/ 24 Port10/100 Mb	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.900.000	
72	07.01.01.85	Handycam	0001	Sony			2013						APBD	6.950.000	
73	06.02.06.21.	Camera Video	0001	Canon Shot G 15		Campuran	2013						APBD	15.660.000	
74	06.02.06.18.	Unit Power Supply	0001	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	APBD	88.910.960	
75	06.02.06.18.	Unit Power Supply	0001	-	-	-	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.175.000	

NO	Kode Barang	Nama/Barang Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	06.01.05.24.	Alat Pematong Kertas	0002	ESCURE	-	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.571.500	
77	06.02.04.03.	AC Unit	0001	Sharp/ AH-A9NCY	Split 1 PK	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.915.000	
78	06.02.04.03.	AC Unit	0002	Sharp/ AH-A9NCY	Split 1 PK	Elektronik	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.065.000	
79	06.02.04.03.	AC Unit	0003	Sharp	Split 2 PK	Campuran	2016						APBD	7.490.000	
80	06.02.04.03.	AC Unit	0004	Polytron		Campuran	2016						APBD	4.990.000	
81	06.02.04.03.	AC Unit	0005	Polytron		Campuran	2016						APBD	4.990.000	
TOTAL													1.206.604.560		